

MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN EKONOMI LOKAL SEKTOR UMKM MELALUI STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DI KABUPATEN NGAWI

Khoyrul Anwar^{1(a)}, Istiana Wijayanti Mala^{2(b)}, Misnan^{3(c)}

¹Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Soerjo Ngawi

^{2,3}Prodi Manajemen, Universitas Soerjo Ngawi

^{a)}khoyrula8@gmail.com, ^{b)}istianawijayantimala@gmail.com, ^{c)}misnan536@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

09-07-2025

Diterbitkan Online:

31-12-2025

Kata Kunci:

Collaborative Governance,
Pengembangan UMKM,
Ekonomi Lokal

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi lokal sektor UMKM. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai. Untuk menjamin kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian, bahwa penerapan *collaborative governance* telah menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Kolaborasi yang terbangun telah mencerminkan adanya sinergi lintas aktor yang berjalan relatif efektif, baik pada dimensi vertikal, horizontal, maupun hubungan kemitraan. Pemerintah daerah sebagai fasilitator utama, Perhimpunan UMKM Ngawi telah memperkuat koordinasi dan pemberdayaan di tingkat akar rumput. Koordinasi yang efektif, pemanfaatan teknologi digital, dan keterlibatan aktif pelaku UMKM merupakan tiga elemen kunci yang saling terkait dalam menentukan keberhasilan kolaborasi tersebut. Koordinasi lintas tingkat dan sektor mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, pemanfaatan teknologi, memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing UMKM.

Keywords:

Collaborative Governance,
MSME Development, Local
Economy

ABSTRACT

The study aims to analyze the implementation of collaborative governance in realizing the sustainability of the local MSME sector economy. The study used a descriptive qualitative method. Interview, observation, and documentation techniques were used to collect data. Data analysis is conducted interactively and continues until completion. To ensure data credibility, researchers used source triangulation techniques. The results of the study show that the implementation of collaborative governance has demonstrated its strategic role in supporting local economic sustainability. The collaboration that has been established reflects the existence of cross-actor synergies that are relatively effective, both vertically and horizontally, as well as in terms of partnership relations. With the local government as the main facilitator, the Ngawi MSME Association has strengthened coordination and empowerment at the grassroots level. Effective coordination, utilization of digital technology, and active involvement of MSME players are three interrelated key elements in determining the success of such collaboration. Cross-level and cross-sector coordination can improve the effectiveness of program implementation, technology utilization, expand market access, and increase the competitiveness of MSMEs.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i4.1326>



PENDAHULUAN

Bisnis di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki prospek yang baik untuk terus ditingkatkan, sehingga UMKM merupakan salah satu unit usaha yang banyak dikembangkan di Indonesia (Sholikin, 2024). Hal ini dibuktikan dengan ketangguhan sektor UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. UMKM memiliki dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penciptaan lapangan kerja (Zaky Al Hakim & Nisa, 2024). Secara Nasional, UMKM telah mampu menampung tenaga kerja yang sangat tinggi mencapai 96,98% sampai 97,22% dengan jumlah tenaga kerja hampir mencapai 62 juta orang (Novianty et al., 2024).

Secara Nasional, sektor UMKM juga memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terlihat dari kontribusi PDB yang cukup besar. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM telah menyumbang 60,5% dari PDB Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki ruang untuk berkembang dan menjadi lebih signifikan secara ekonomi (Yolanda & Hasanah, 2024).

Di tingkat lokal, UMKM sering menjadi tulang punggung ekonomi yang memberikan peluang kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata ditingkat komunitas-komunitas masyarakat (Ramadani et al., 2025). Kabupaten Ngawi sendiri memiliki tingkat pertumbuhan UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data BPS Ngawi, terdapat 41.321 UMKM di Kabupaten Ngawi pada tahun 2020. Setelah wabah, jumlah UMKM kembali meningkat di tahun 2022, mencapai 47.132 unit. Jumlah UMKM itu kemudian meningkat menjadi 68.991 unit pada tahun 2023 dan 79.937 unit pada tahun 2024.

Meskipun UMKM di Kabupaten Ngawi terjadi peningkatan jumlah dan mempunyai peran penting dalam hal ketahanan ekonomi lokal, ternyata UMKM yang ada masih banyak menghadapi berbagai persoalan atau tantangan yang menghambat perkembangan mereka. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Ngawi (2021) dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novianty et al., 2024) bahwa teridentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi UMKM Ngawi termasuk masalah keterbatasan akses modal, kendala dalam mengadopsi teknologi

baru, kesulitan dalam mencapai pasar yang lebih luas, dan rendahnya kapasitas secara manajerial di kalangan pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu terdapat kebutuhan mendesak untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM agar mereka dapat lebih berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat (Muhamad Syata, 2025).

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi, Harsoyo menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya memberikan dukungan dalam pengembangan dan keberlanjutan bisnis UMKM melalui berbagai program dan kebijakan. Adapun program inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti pelatihan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat, serta fasilitasi pameran dan promosi produk UMKM. Selain itu, kolaborasi dengan lintas sektor (*collaborative governance*) juga turut dilakukan dan hal itu dianggap sebagai strategi penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM di Ngawi. Sektor swasta yang terlibat aktif dalam kolaborasi ini ialah Perhimpunan UMKM Ngawi. Dimana Perhimpunan UMKM Ngawi ini telah ikut serta dan berperan memberikan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar bagi UMKM, serta menjembatani komunikasi antara UMKM dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Collaborative governance known collaborative governance incorporates a number of stakeholders, such as the public and commercial sectors as well as civil society, in the formulation and execution of policies (Tomo et al., 2020). Sudut pandang ini memperjelas bahwa berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor publik dan komersial serta masyarakat sipil, terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pihak melalui partisipasi yang aktif, transparansi, dan akuntabilitas (Elani et al., 2025). Dengan mengedepankan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan ini, *collaborative governance* memungkinkan terbentuknya solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Das, 2023).

Pendekatan *collaborative governance* ini juga dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi masalah kompleks yang memerlukan

kerjasama dan koordinasi multi-pihak (Hardi, 2020). Misalnya dalam konteks pengembangan UMKM, *collaborative governance* dapat memainkan peran penting dengan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan komunitas lokalnya untuk bersama-sama merumuskan kebijakan, program atau tindakan lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal pelaku usaha UMKM (Ibrahim, 2022). Melalui proses ini, kebijakan atau program yang dihasilkan tidak hanya lebih relevan dan tepat sasaran, tetapi juga memiliki dukungan luas dari berbagai *stakeholder* yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasinya (Mandala & Toni, 2024).

Penerapan *collaborative governance* dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan pengembangan UMKM, telah terbukti efektif di berbagai daerah (Santy & Alam, 2022). Contoh di Kabupaten Banyuwangi, penerapan *collaborative governance* antara pemerintah daerah, sektor swasta dan komunitas lokal telah berhasil meningkatkan daya saing UMKM melalui inovasi produk dan akses pasar yang lebih luas. Di Banyuwangi *collaborative governance* diterapkan pada program "Smart Kampung" memanfaatkan teknologi dengan mengkolaborasikan seluruh *stakeholders* untuk menciptakan ekosistem digitalisasi UMKM (Farizi & Harmawan, 2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada: fokus di sektor ekonomi lokal (UMKM), pada interaksi dan kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi lokal yang inklusif yang menekankan pada pendekatan *bottom-up* terhadap kebutuhan spesifik UMKM, bukan program *top-down* yang bersifat generik. Selain itu, penelitian tentang keberlanjutan ekonomi lokal di sektor UMKM di Kabupaten Ngawi belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga hal ini menjadi kebaruan penelitian ini.

Sehingga menurut peneliti, penelitian ini dirasa sangat penting dan tertarik untuk dilakukan guna mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi lokal pada sektor UMKM di Kabupaten Ngawi, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* yang diterapkan di Kabupaten Ngawi dalam mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Dalam rangka meningkatkan kinerja, kapabilitas, dan daya saing UMKM di Kabupaten Ngawi, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kemitraan yang sukses dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Colorafi & Evans, (2016) menjelaskan bahwa *research that collects data in the form of observed words, images, and behaviors instead of numerical data is referred to as descriptive qualitative research.*

Sasaran penelitian ini mencakup Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Ngawi selaku mengelola program, sektor swasta meliputi perhimpunan UMKM Ngawi, pengusaha atau pemilik usaha yang terlibat dalam inisiatif kemitraan, sedangkan masyarakat dan pelaku UMKM secara individu sebagai menerima manfaat dari program.

Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ketiga metode ini dipilih untuk memungkinkan peneliti dalam memahami konteks sosial dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi UMKM secara lebih holistik. Pemilihan informan dengan *purposive sampling*, yakni peneliti secara sengaja memilih individu yang dianggap paling relevan dan memiliki informasi mendalam terkait objek penelitian dengan kriteria utama individu yang terlibat aktif, memiliki pengetahuan terkait, dan mengalami sendiri. Informan dari Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Ngawi berjumlah 1 orang yakni Kepala Dinas, informan dari Perhimpunan UMKM Ngawi berjumlah 1 orang yakni Ketua Perhimpunan, dan informan dari pelaku usaha UMKM berjumlah 2 orang.

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai (Ridder, 2014). Data penelitian diringkas terlebih dahulu, kemudian peneliti akan mengklasifikasikan dan mengelompokkan datanya, serta menghasilkan ringkasan. Peneliti juga memeriksa dan mengelompokkan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Data disajikan secara naratif dan memberikan penjelasan tentang hasil dan kesimpulan

(Ridder, 2014). Kemudian, untuk menjamin kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu memeriksa data dari berbagai informan seperti: kepala dinas, kepala perhimpunan, dan pelaku usaha UMKM untuk melihat apakah informasinya konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori *collaborative governance* yang dipakai untuk acuan penelitian ini adalah teori yang dikembangkan oleh Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney (Astuti et al., 2020) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah publik, serta memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas masyarakat dalam konteks pengembangan UMKM.

Tabel 1. Fokus Penelitian

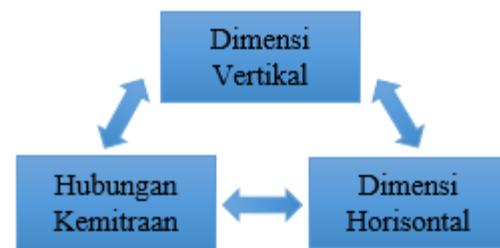
Dimensi	Sub Aspek
Vertikal	1. Interaksi dengan Pemerintah. 2. Komunikasi dan kordinasi dengan pemerintah
Horisontal	1. Kerjasama dengan pelaku UMKM dan Organisasi Non-Pemerintah
Kemitraan	1. Integrasi Dukungan dan kolaborasi. 2. Tantangan sosial 3. Evaluasi keberhasilan kolaborasi

Sumber : diolah dari (Astuti et al., 2020)

Untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi lokal di Kabupaten Ngawi, pengembangan UMKM adalah menjadi sangat penting untuk dilakukan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi, harus secara aktif memberikan dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, dan fasilitas pemasaran. Selain itu, sektor swasta bersama dengan komunitas masyarakat seperti Perhimpunan UMKM Ngawi, turut berperan dalam meningkatkan kualitas produk UMKM dan memperluas jaringan pemasaran baik di tingkat lokal maupun regional. Kolaborasi ketiga *stakeholders* ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pelaku dan daya saing UMKM agar dapat berkompetisi di pasar yang lebih luas (G. Pratama et al., 2025).

Keberlanjutan ekonomi sektor UMKM di Kabupaten Ngawi, memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Dalam konteks ini, *collaborative governance* menjadi kerangka kerja untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi, Perhimpunan UMKM Ngawi, Bank Indoneisa, serta pelaku UMKM itu sendiri. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, akses permodalan, dan daya saing UMKM melalui sinergi lintas sektor (Widyawan & Barlian, 2025).

Teori Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney (Astuti et al., 2020) mengidentifikasi tiga dimensi kunci dalam *collaborative governance* yakni dimensi vertikal, horizontal, dan hubungan kemitraan yakni dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Pola Collaborative Governance

Sumber: (Astuti et al., 2020)

Dimensi Vertikal

Dimensi vertikal dalam *collaborative governance* mengacu pada hubungan hierarkis melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan pelaku usaha UMKM di tingkat lokal sebagai pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah pusat berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, serta menyediakan sumber daya yang kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah untuk diimplementasikan secara spesifik sesuai kebutuhan lokal (Astuti et al., 2020). Di Kabupaten Ngawi, Dinas Koperasi dan UMKM memainkan peran strategis sebagai perantara kebijakan pusat bagi pelaku UMKM di Ngawi, sekaligus menjadi fasilitator utama dalam pelaksanaan program-program pengembangan UMKM seperti pelatihan manajerial dan digitalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu contoh konkret ialah pelaksanaan program pelatihan manajerial dan digitalisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi dengan dukungan Bank

Indonesia Kediri. Harsoyo, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi menjelaskan bahwa pelatihan manajerial bertujuan meningkatkan kompetensi pelaku UMKM Ngawi dalam perencanaan keuangan, manajemen SDM, dan inovasi produk. Sementara, pelatihan digitalisasi bertujuan membantu pelaku UMKM Ngawi memanfaatkan teknologi untuk pemasaran, manajemen inventaris, hingga transaksi *online*, yang semakin relevan untuk diadopsi di era digital ini. Menurutnya, program ini tidak hanya memperkuat kapasitas pengelolaan usaha tetapi juga mendorong UMKM untuk lebih kompetitif di pasar domestik maupun global.

Bank Indonesia berperan penting dalam mendukung sektor UMKM dengan menyediakan akses pembiayaan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan pinjaman berbunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah. Selain itu, Bank Indonesia juga turut mendukung pelatihan-pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui solusi keuangan inklusif dan pendampingan teknis. Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi dengan Bank Indonesia ini dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif, memberikan akses pasar baru, serta memperkuat kompetensi pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan modernisasi.

Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku UMKM menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan dan program berjalan optimal (Mohamad et al., 2024). Terkait hal ini, menurut Dyah Ayu Saraswati selaku Ketua Perhimpunan UMKM Ngawi menjelaskan bahwa forum diskusi, pelatihan, serta musyawarah rutin menjadi wadah strategis untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, dan solusi bersama. Melalui interaksi yang intensif, pemerintah dapat menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan spesifik UMKM Ngawi.



Gambar 2. Pelatihan Design Konten Digital Marketing

Berdasarkan observasi data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi (2024) mencatat sebanyak 84,5% UMKM yang kini mampu memanfaatkan *platform digital* untuk mengiklankan produknya dan membawa pengaruh secara signifikan terhadap *income* mereka. Sisanya, sebanyak 15,5% pelaku UMKM masih tetap bertahan memasarkan produknya secara konvesional. Terkait hal ini, Zelvianagita & Prathama, (2023) menegaskan bahwa kapasitas pemasaran pelaku UMKM secara *online* lebih besar dan kuat untuk berkembang, daripada pelaku UMKM *offline*.

Keberhasilan dimensi vertikal ini sangat bergantung pada koordinasi lintas tingkat yang harmonis (Ramdhany & Djumiarti, 2016). Menurut peneliti, yang didasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, program dari pemerintah daerah, dan sinergi berbagai pihak seperti dukungan Bank Indonesia, juga para pelaku UMKM di Kabupaten Ngawi saat ini telah mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan menciptakan inovasi produk yang lebih unggul, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan dan daya saing ekonomi daerah. Harsoyo juga menggaskan bahwa secara ekonomi, kontribusi UMKM Ngawi cukup signifikan dengan estimasi pendapatan mereka yang rata-rata mencapai Rp 3 juta per bulan per pelaku UMKM, dimana perputaran uang dari sektor UMKM ini mencapai sekitar Rp 575 miliar per tahun.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh, menemukan fakta bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM secara aktif mengadakan pertemuan dengan pelaku UMKM Ngawi untuk memberikan informasi terkini, baik melalui tetap muka atau media digital seperti *grup WhatsApp*. Menurut Harsoyo, pertemuan tersebut berfungsi sebagai wadah dialog, dan memungkinkan bagi pelaku UMKM untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, serta mendapatkan penjelasan terkait kebijakan yang diterapkan. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan Dyah Ayu Saraswati, bahwa sosialisasi atau pertemuan yang dilakukan pemerintah daerah sangat membantu pelaku UMKM dalam memahami perubahan kebijakan, regulasi baru, dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

Terkait temuan diatas, menurut peneliti bahwa selain memberikan informasi kebijakan terkini, sosialisasi yang dilakukan tersebut dapat membuka ruang diskusi untuk membahas strategi adaptasi UMKM terhadap perubahan pasar. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh (Malik et al., 2024) bahwa dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku UMKM dapat menyusun strategi yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan pasar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur et al., (2022) yang menekankan bahwa sosialisasi kebijakan pemerintah adalah faktor kunci untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku UMKM dalam program pemberdayaan. Penguatan *collaborative governance* seperti pemanfaatan media digital untuk pemasaran, juga mampu membantu UMKM memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing mereka di tengah tantangan modernisasi (Lean et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi sangat mendukung pelaku UMKM melalui sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan manajemen keuangan, pemasaran digital, dan efisiensi produksi. Tentunya, pelatihan ini memberikan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan langsung, mempersiapkan UMKM menghadapi persaingan pasar.

Forum diskusi rutin antara pemerintah dan pelaku UMKM menjadi wadah aspirasi, berbagi tantangan, dan mencari solusi bersama. Interaksi melalui forum tatap muka atau media digital, seperti grup WhatsApp, memperkuat komunikasi, memastikan kebijakan relevan dengan kondisi lapangan. Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas tingkat dalam *collaborative governance* untuk meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan UMKM secara efektif dan berkelanjutan.

Dimensi Horizontal

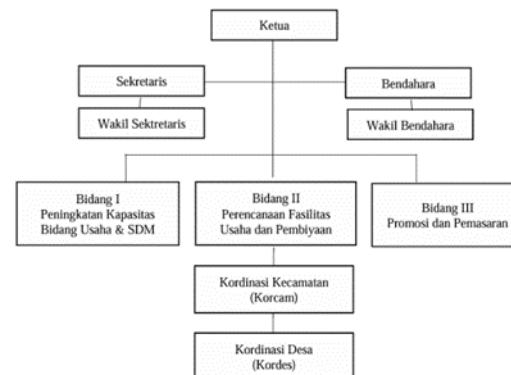
Dimensi horizontal dalam *collaborative governance* menekankan adanya kolaborasi sejajar antar aktor lokal untuk menciptakan solusi berbasis kebutuhan lokal (Astuti et al., 2020). Perhimpunan UMKM Ngawi berperan sebagai wadah koordinasi berbagi informasi dan jaringan. Pelaku usaha UMKM lokal menghasilkan produk inovatif berbasis potensi lokal. Sementara itu, komunitas lokal mendukung ekosistem UMKM sebagai

konsumen utama dan peserta aktif dalam kegiatan kolaboratif. Semua pihak akan dapat memperkuat kapasitas, pasar, dan daya saing UMKM, menciptakan keberlanjutan ekonomi berbasis kekuatan lokal (Agustina et al., 2025).



Gambar 3. Pelantikan Kepengurusan Perhimpunan UMKM Ngawi

Kepengurusan terbaru Perhimpunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ngawi dilantik pada tanggal 19 Desember 2023 oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Hasono di Gedung Kantor Pusat KSPP Syariah Bee Mass Jawa Timur dengan struktur organisasi berikut:



Gambar 4. Struktur Kepengurusan Perhimpunan UMKM Ngawi

Menurut peneliti, struktur organisasi yang sistematis dan terkoordinasi memainkan peran kunci dalam mendukung pengembangan UMKM Ngawi. Menurut Harsoyo dan Dyah Ayu Saraswati dalam wawancaranya, sependapat bahwa struktur ini dirancang untuk memastikan pembagian tugas yang jelas, efisiensi operasional, dan kolaborasi yang efektif dalam mendukung pelaku UMKM.

Berdasarkan observasi pada dokumen AD/ART Perhimpunan UMKM Ngawi, peneliti dapat menganalisa terkait struktur organisasi, dimana pada posisi pimpinan utama, ketua memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengarahkan kegiatan organisasi agar berjalan sesuai visi dan misi. Bendahara bertugas mengelola aspek keuangan organisasi, mulai dari pencatatan hingga

pelaporan dana. Sedangkan sekretaris berperan dalam mengatur administrasi, dokumentasi, dan komunikasi, baik secara internal maupun eksternal. Posisi wakil bendahara dan wakil sekretaris hadir untuk mendukung peran utama mereka serta mengambil alih tugas ketika diperlukan.

Selain posisi inti, Perhimpunan UMKM Ngawi juga memiliki tiga bidang utama dengan tugas spesifik. Bidang I fokus pada peningkatan kapasitas usaha dan pengembangan sumber daya manusia. Bidang ini bertujuan mengembangkan keterampilan anggota Perhimpunan UMKM Ngawi dan meningkatkan kualitas produk UMKM agar lebih kompetitif. Bidang II bertanggung jawab terhadap perencanaan fasilitas usaha dan pembiayaan. Dalam praktiknya, bidang ini merancang strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, sekaligus menyediakan fasilitas pendukung untuk membantu perkembangan usaha. Sementara itu, Bidang III menangani promosi dan pemasaran yang tugas utamanya adalah meningkatkan daya saing produk UMKM melalui strategi *marketing* yang efektif dan akses ke pangsa pasar konsumen yang lebih luas.

Terdapat juga Koordinator Kecamatan (Korcum) dan Koordinator Desa (Kordes). Peneliti dapat menjelaskan bahwa Korcum bertindak sebagai penghubung antara tingkat desa dalam kecamatan, memastikan program-program Perhimpunan UMKM Ngawi berjalan terkoordinasi dengan baik. Sementara itu, Kordes memainkan peran langsung di tingkat desa dengan mendampingi pelaku UMKM, menyampaikan kebutuhan lokal kepada Korcum, dan menjalankan program-program Perhimpunan UMKM Ngawi secara efektif.

Peneliti berpendapat bahwa dengan pembagian tugas yang sistematis ini, Perhimpunan UMKM Ngawi telah mampu menjalankan perannya sebagai penghubung utama antara pelaku UMKM dan pemerintah daerah. Organisasi ini juga memfasilitasi diskusi di antara anggota UMKM untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, Perhimpunan UMKM Ngawi menjadi wadah untuk menyampaikan solusi inovatif yang berasal langsung dari pelaku usaha.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Hidayat et al., (2022) memberikan gambaran tentang bagaimana kolaborasi yang efektif dapat menciptakan dampak positif bagi pelaku

UMKM. Penelitian tersebut mengadopsi lima tahapan *collaborative governance* yaitu dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan tindakan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam digitalisasi UMKM berhasil meningkatkan daya saing UMKM meskipun terdapat tantangan berupa keterampilan digital yang belum merata, terutama dikalangan pelaku UMKM yang lebih tua. Temuan tersebut cukup relevan untuk Kabupaten Ngawi, dimana literasi digital dan keterampilan teknologi menjadi elemen penting dalam memajukan UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa melalui pelatihan intensif dan dukungan akses teknologi, kolaborasi dapat menjadi faktor kunci untuk membantu UMKM lokal bersaing di pasar digital. Dalam hal ini, peran Perhimpunan UMKM Ngawi sangat strategis, khususnya dalam menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dengan program disediakan oleh pemerintah daerah dan sektor swasta. Dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, seperti pelatihan manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan teknologi, menjadi pilar penting dalam pengembangan UMKM. Anggota Perhimpunan UMKM Ngawi juga menerima bantuan modal melalui skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan akses pasar melalui program pameran, ekspor, dan penggunaan *platform digital*.

Bimbingan teknis dari pemerintah daerah, seperti pendampingan dalam pengurusan izin usaha dan standarisasi produk, turut meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Hal ini selaras dengan penelitian Yunas & Nailufar (2021) yang menyoroti pentingnya struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik. Penelitiannya menunjukkan bahwa organisasi UMKM dalam bentuk apapun, ialah sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan pemerintah daerah, memainkan peran penting dalam mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan kapasitas UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan.

Penekanan pada kolaborasi horizontal menambah wawasan tentang bagaimana Perhimpunan UMKM Ngawi dapat memperkuat sinergi lokal yang berbasis kekuatan komunitas. Dengan adanya dimensi horizontal, Perhimpunan UMKM Ngawi mampu menjembatani hubungan antara

UMKM dengan sektor lain yang selevel di Ngawi. Hal ini menciptakan sinergi lokal yang tangguh, mengurangi ketergantungan pada dukungan eksternal, dan mendorong pengembangan berkelanjutan berbasis potensi lokal (Kaseng, 2025). Struktur organisasi Perhimpunan UMKM Ngawi yang terkoordinasi dengan baik dan kolaborasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal, telah menjadikan organisasi ini sebagai elemen vital dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Ngawi. Dengan strategi yang terfokus pada peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan akses pasar, Perhimpunan UMKM Ngawi tidak hanya membantu pelaku UMKM bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan era modern.

Hubungan Kemitraan

Dalam teori *collaborative governance* hubungan kemitraan menggambarkan sebuah kolaborasi erat dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai sektor, seperti pemerintah, sektor swasta, asosiasi UMKM, dan komunitas lokal, yang bekerja sama dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program-program kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama (Astuti et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian baik wawancara maupun observasi, ditemukan bahwa ada beberapa tantangan administratif yang masih perlu diperbaiki untuk mempercepat proses pengajuan pinjaman modal untuk pelaku UMKM yang tergabung dalam Perhimpunan UMKM Ngawi. Selain itu, sebagian pelaku UMKM juga menyampaikan bahwa pelatihan yang mereka terima membantu meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produk, meskipun masih diperlukan lebih banyak pendampingan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Evaluasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa program pelatihan dan pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Ngawi. Salah satu indikator keberhasilan yang dapat dilihat adalah peningkatan jumlah UMKM yang menggunakan *platform digital* untuk transaksi dan pemasaran, serta meningkatnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Ngawi. Namun, beberapa pelaku UMKM mengungkapkan bahwa akses ke program

tersebut masih perlu diperluas, terutama untuk UMKM yang belum tergabung dalam Perhimpunan UMKM Ngawi sehingga belum sepenuhnya merasakan manfaat kolaborasi ini.

Selain evaluasi, dampak terhadap pelaku UMKM penting untuk menilai sinergi antar pemangku kepentingan. Berdasarkan wawancara dengan Dyah Ayu Saraswati selaku Ketua Perhimpunan UMKM Ngawi, merasa bahwa komunikasi antar *stakeholder* sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaan program. Misalnya, perlu adanya jadwal pertemuan rutin untuk memonitor perkembangan program dan menyelesaikan perbedaan pandangan yang mungkin muncul. Pendekatan ini akan membantu menciptakan kolaborasi yang lebih inklusif dan efisien (Astuti et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan UMKM didukung oleh tiga elemen kunci yang saling terkait. Temuan ini sejalan dengan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi antarpemangku kepentingan sangat ditentukan oleh adanya proses koordinasi yang efektif, kesamaan visi, serta kejelasan peran masing-masing aktor (Setiawandari & Kriswibowo, 2023). Dalam konteks pengembangan UMKM di Kabupaten Ngawi, koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan Perhimpunan UMKM Ngawi menjadi elemen utama untuk menciptakan sinergi yang optimal. Penyelarasan visi dan tujuan bersama dapat diwujudkan melalui penetapan indikator keberhasilan yang jelas dan spesifik, sebagaimana ditegaskan dalam teori manajemen kinerja oleh Kaplan dan Norton (1996) yang menyatakan bahwa indikator kinerja berfungsi sebagai alat penyelarasan strategi dan pengukuran capaian tujuan. Dengan adanya pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, kolaborasi dapat berjalan lebih efektif, meminimalkan tumpang tindih tugas, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan program (Augustinah, 2019). Temuan ini juga mendukung pandangan Provan dan Kenis (2008) bahwa pengelolaan jaringan kolaboratif yang baik akan meningkatkan kinerja kolaborasi dan memberikan manfaat bagi seluruh aktor yang terlibat (Rahmatika et al., 2023).

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong transformasi UMKM di Kabupaten Ngawi. Temuan ini sejalan dengan konsep *digital transformation* dan *technology adoption* yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Menurut teori diffusion of Innovation yang dikemukakan oleh Rogers (2003), adopsi teknologi oleh pelaku UMKM dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam memahami manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi tersebut (Petrus Suhardi Ekaputra et al., 2024). Dalam konteks ini, program pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi, seperti pengenalan *platform digital* untuk pemasaran dan manajemen bisnis, berperan penting dalam meningkatkan kesiapan dan kapasitas pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan tuntutan era digital. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan UMKM di Ngawi untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke skala regional dan internasional, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan Bharadwaj et al. (2013) yang menegaskan bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung operasional, tetapi juga sebagai sumber penciptaan peluang bisnis baru dan keunggulan kompetitif yang sebelumnya sulit dijangkau oleh UMKM konvensional (R. Pratama et al., 2025).

Peningkatan keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam setiap tahap kolaborasi merupakan faktor penting lainnya dalam mendukung keberhasilan pengembangan UMKM di Kabupaten Ngawi. Temuan ini juga sejalan dengan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya partisipasi langsung para pemangku kepentingan sebagai prasyarat utama dalam membangun proses kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif pelaku UMKM dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pengalaman secara langsung, sehingga kebijakan yang dirumuskan menjadi lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan (Yudhistiira Rizqy & Anugrahini, 2024). Hal ini juga selaras dengan konsep *participatory development* yang dikemukakan

oleh Chambers (1997), yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat sasaran secara aktif akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan (Padila, 2025). Dalam konteks ini, masukan dan umpan balik dari pelaku UMKM di Ngawi perlu dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan serta program-program Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ngawi ke depan, agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi pelaku usaha secara aktual.

Dengan mengintegrasikan koordinasi yang efektif, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan aktif pelaku UMKM, kolaborasi antarpemangku kepentingan berpotensi menjadi kekuatan strategis dalam mendorong pengembangan UMKM di Kabupaten Ngawi secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat kerangka *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh keterpaduan proses koordinasi, kapasitas aktor, serta partisipasi aktif pihak yang terlibat. Koordinasi yang efektif berfungsi sebagai fondasi untuk menyelaraskan visi dan peran aktor, pemanfaatan teknologi berperan sebagai enabler dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi UMKM, sementara keterlibatan aktif pelaku UMKM memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Ketiga elemen tersebut saling melengkapi dan membentuk ekosistem kolaboratif yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sebagaimana ditegaskan dalam konsep *local economic development* yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui sinergi aktor, inovasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja UMKM, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap penguatan perekonomian lokal Kabupaten Ngawi secara keseluruhan (Nur et al., 2022).

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* pada UMKM di Kabupaten Ngawi telah menunjukkan peran strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Kolaborasi yang terbangun antara pemerintah daerah, sektor

keuangan, Perhimpunan UMKM Ngawi, serta pelaku UMKM itu sendiri mencerminkan adanya sinergi lintas aktor yang berjalan relatif efektif, baik pada dimensi vertikal, horizontal, maupun hubungan kemitraan. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM berperan sebagai fasilitator utama kebijakan dan program, sementara Perhimpunan UMKM Ngawi menjadi penghubung penting dalam memperkuat koordinasi, komunikasi, dan pemberdayaan di tingkat akar rumput.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif, pemanfaatan teknologi digital, dan keterlibatan aktif pelaku UMKM merupakan tiga elemen kunci yang saling terkait dalam menentukan keberhasilan kolaborasi. Koordinasi lintas tingkat dan lintas sektor mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, pemanfaatan teknologi memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing UMKM, sedangkan partisipasi aktif pelaku UMKM memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Temuan ini memperkuat kerangka *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), serta menegaskan bahwa kolaborasi yang inklusif dan terintegrasi menjadi prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah tantangan, khususnya terkait aspek administratif, pemerataan akses program, serta kebutuhan akan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, penguatan mekanisme evaluasi, peningkatan transparansi, serta perluasan jangkauan kolaborasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan ke depan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan daya saing UMKM, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian lokal Kabupaten Ngawi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, S. P. , Endri, V. D., Saputri, R. T., & Zora, F. (2025). Strategi Pengembangan UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3),

5123–5135.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/inovative.v5i3.19286>

Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (Cetakan Pertama, Vol. 1). Universitas Diponegoro Press.

Augustinah, F. (2019). Manajemen Kinerja Balanced Scorecard Untuk Koperasi Dan UMKM. *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 2(2), 219–235.

Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative Descriptive Methods in Health Science Research. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 9(4), 16–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1937586715614>

Das, A. K. (2023). Collaborative Governance. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 1772–1775).

Elani, K. A., Pribadi, I. A. P., Sutikno, C., Amanda, A., & Atika, Z. R. (2025). Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 77–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6821>

Farizi, S. Al, & Harmawan, B. N. (2020). *Kota Cerdas di Era Pandemi: Inovasi Smart Kampung Banyuwangi Menyambut New Normal* (I. D. Apriliyanti, Ed.; pp. 1–69).

Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press.

Hidayat, W. A., Hermani, A., & Budiatmo, A. (2022). Resiliensi Bisnis pada UMKM Batik Balqis Semarang di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 11(2), 207–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiab.2022.34445>

- Ibrahim, H. R. (2022). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pendekatan Inovasi Sosial Dan Collaborative Governance. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 43(1), 103-116. <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/jib.v43i1.1532>
- Kaseng, E. S. (2025). Community Empowerment Based on Local Potential in UMKM Development. *Journal of Marginal Social Research*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/https://ejournal.arenasosial.web.id/index.php/jomasore/article/view/17>
- Lean, F., Fany, S., & Muhammad, T. (2024). Transformasi UMKM Kulon Progo : Langkah Strategis Menghadapi Dominasi Pasar Modern melalui Kebijakan Toko Milik Rakyat (Tomira). *Jurnal Sudut Pandang*, 4(6), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/jsp.v4i6.766>
- Malik, A., Djaganata, A. Y., Kurniawan, N. E., & Oktavia, Y. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10). <https://doi.org/https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1908>
- Mandala, A., & Toni, A. (2024). Optimalisasi Komunikasi Organisasi Dalam Penguatan Eksistensi Kelembagaan Dewan Energi Nasional. *Jurnal Publisitas*, 10(2), 120–134. <https://doi.org/http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/>
- Mohamad, S., Saleh, G. S., & Umuri, H. (2024). Implementation of the UMKM Program in Poverty Alleviation di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 117–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.59713/projip.v3i2.1129>
- Muh. Syata, W. (2025). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 63–70.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/sdsh9b41>
- Novianty, R., Dewi, S. P., & Anwar, K. (2024). Strategi Digitalisasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Pasca Pandemi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(2), 50–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jab.v4i2.5238>
- Nur, M. I., Juana, T., Ningrum, E. W., & Sutisna, S. (2022). Collaborative Governance in the UMKM Juara Program as an effort to increase the competence of West Java Enterprises. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.35196>
- Padila, C. (2025). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa terhadap Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (JISH)*, 1(1), 8–14.
- Petrus Suhardi Ekaputra, Fitri Ciptosari, & Tedy Halim. (2024). Adopsi Teknologi Pembayaran Digital QRIS di Kalangan UMKM Labuan Bajo: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Akademisi Vokasi*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.63604/javok.v3i2.138>
- Pratama, G., Adipurno, S., & Fauziyah, S. N. (2025). Strategi Digitalisasi UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *Tafakur Times Journal (JSI)*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/https://onlinejournal.penacerification.com/index.php/jsi/article/view/136>
- Pratama, R., Purwaamijaya, B. M., & Hermawan, A. (2025). Peran entrepreneurial self-efficacy dalam hubungan digital competence dan opportunity recognition capacity terhadap nascent entrepreneurial behavior. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 6(2), 329–343.

- Rahmatika, N. I., Sutisna, S., & Budiarto, A. (2023). Analisis Jaringan Koordinasi Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tsunami Tahun 2018 Di Kabupaten Pandeglang. *Cross-Border*, 6(1), 748–762.
- Ramadani, S., Ramadhani, D. A., Ikrom, M., & Harahap, L. M. (2025). Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 158–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183>
- Ramdhany, I., & Djumiarti, T. (2016). Faktor-Faktor dalam Koordinasi Lintas Sektoral Pengelolaan Drainase di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 938–954. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183>
- Ridder, H.-G. (2014). Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. *Erman Journal of Human Resource Management: Zeitschrift Für Personal Forschung*, 28(4), 485–485. <https://doi.org/10.1177/239700221402800402>
- Santy, Y. J. N., & Alam, M. D. S. (2022). Collaborative Governance Dalam Mendukung Keberlanjutan Ekonomi Lokal Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(2), 95–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/adbisprenuer.v7i2.33211>
- Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149–155.
- Sholikin, A. (2024). Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara Regulasi, Akses Permodalan, dan Digitalisasi. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(03), 429–451. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.9002>
- Tomo, A., Mangia, G., Hinna, A., & Pellegrini, M. M. (2020). Making collaborative governance effective: a case study on the pathway to successful public-private interactions. *International Journal of Public Sector Performance Management (IJPSPM)*, 6(1), 36–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.1504/IJPSM.2020.105087>
- Widyawan, B., & Barlian, A. (2025). Model Kolaborasi Enabler untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Digitalisasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(1), 52–63. <https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/392036783>
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>
- Yudhistiira Rizqy, D., & Anugrahini, T. (2024). Keterlibatan Inklusif Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Collaborative Governance dalam Pemulihian Sosial-Ekonomi Penyintas Erupsi Gunung Sinabung. *Sosio Konsepsia*, 13(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v13i3.3475>
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2021). Pemberdayaan Ruang Inovasi Kabupaten Jombang Sebagai Komunitas Pemuda Penggerak Pembangunan Desa Dalam Optimalisasi Produk UMKM. *Surya Abdimas*, 5(4), 561–572. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i4.1371>
- Zaky Al Hakim, M. R., & Nisa, F. L. (2024). Indonesia SME Resilience in the Creative Economy Sector: Lessons from the Post-COVID-19 Pandemic Era. *Independent: Journal of Economics*, 4(2), 91–101. <https://doi.org/https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/59410>
- Zelvianagita, F., & Prathama, A. (2023). Upaya Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UMKM Keripik Tempe Di Desa Karangtengah Prandon Kabupaten

Ngawi. *Journal Publicuho*, 6(2), 702–715.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.194>